



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SYAFII
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 28809

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.155.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/195 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 364.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA REBORN MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 179.356.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 185.091.766**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.883.447.766

III. HUTANG Rp. 20.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.863.447.766



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.